

**SIKAP POLITIK PARTAI PENDUKUNG PRABOWO-
SANDI TERHADAP BERGABUNGNYA PARTAI
GERINDRA KE KOALISI INDONESIA MAJU
(Studi Kasus: Kader Partai PKS dan Partai PAN
DPD Kota Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik Program
Studi Ilmu Politik**

**Disusun Oleh:
Muhammad Fajri
NIM: 1657020075**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 1442 H / 2021 M**

NOTA PEMBIMBING

Hal :Pengajuan Sidang Munaqosah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah di-Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dan kami periksa serta diadakannya perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul judul **“Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju (Studi Kasus: Kader Partai PKS dan Partai PAN DPD Kota Palembang)”** yang ditulis oleh saudara Muhammad Fajri (1657020075) telah dapat diajukan dalam siding Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Walaikumussalam Wr.Wb

Palembang, Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Andi Candra Jaya, S.Ag. M. Hum
NIP. 197201192007011011

Pembimbing II



Reni Apriani, M. Si
NIDN. 202104940

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Muhammad Fajri
Nim : 1657020075
Fajultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik/ Ilmu Politik
Judul Skripsi : Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju (Studi Kasus: Kader Partai PKS dan Partai PAN DPD Kota Palembang)

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang secara *online* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Agustus 2021
Pukul : 11:00-12:00 WIB

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Strata Satu pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.


Palembang, Agustus 2021

Dean,

Prof. Dr. Izomidin, MA
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Dr. Eti Yusnita, M.HI
NIP. 19740924200712016


Rylvian Chandra, MA
NIP.1986045201903010111

PENGUJI I

PENGUJI II


Dr. Yenzizal, S.Sos., M.Si
NIP. 197401232005011004


Raegen Harahap, MA
NIDN. 2011059202

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan diawah ini :

Nama : **Muhammad Fajri**
Tempat Tanggal Lahir : **Palembang, 26 Juli 1998**
Nim : **1657020075**
Jurusan : **Ilmu Politik**
Judul Skripsi : **Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju (Studi Kasus: Kader Partai PKS dan Partai PAN DPD Kota Palembang)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dan mendapatkan gelar Strata 1 di UIN Raden Fatah Palembang
2. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar- benarnya dan apabila dikemudianhari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi

Palembang , Agustus 2021



Muhammad Fajri
NIM. 1657020075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kemarin adalah sejarah yang bisa kita ambil hikmahnya, Hari ini adalah kita apapun bisa kita lakukan, Esok adalah misteri yang tidak dapat kita rencanakan ataupun tidak dapat kita rencanakan”

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahnda Badai Trisuwa dan Ibunda Christina Yulistiawati.
2. Adik tercinta Muhammad Rizky.
3. Bapak dan Ibu pembimbing skripsi Dr. Andi Candra Jaya, M. Hum. dan Reni Apriani, M. Si.
4. Ketua Prodi dan Sekertaris Program Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
5. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan Banyak Ilmu dan Wawasan kepada Penulis.
6. Seluruh sahabat Ilmu Politik C angkatan 2016, yang telah bersama-sama berbagi ilmu, berdiskusi, bercanda, dan saling berbagi rasa kalian luar biasa dan teristimewah serta konsultan politik yang telah bersama dalam keadaan susah maupun senang

ABSTRAK

Koalisi pada dasarnya dibentuk karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh masing-masing kelompok, dalam hal ini partai politik. Dalam konteks politik, koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan umum berlangsung, bertujuan untuk menggalang kekuatan dan suara untuk dapat memenangkan pemilu. Pada PILPRES 2019 lalu terdapat 2 kubu politik yang bertarung, setelah ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam pembentukan kabinet Jokowi jilid II atau Kabinet Kementerian Indonesia Maju. Setelah masa pemilihan umum selesai koalisi partai politik kemudian berlanjut untuk melancarkan jalannya pemerintahan dengan dukungan dari partai politik anggota koalisi. Dinamika politik yang terjadi pada saat pembentukan kabinet kementerian pada posisi menteri Pertahanan yang ditunjuk adalah Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum dari Partai Gerindra yang pada PILPRES kemarin Partai Gerindra bersama Partai PKS dan Partai PAN berkoalisi melawan koalisi yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin oleh karena itu hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini berjudul "Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju" tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sikap Partai Politik Partai PKS dan Partai PAN setelah bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Maju dan meninggalkan Koalisi sebelumnya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi bergabungnya partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju. Teori yang di gunakan adalah teori Almond dan Verba dalam teori tersebut terdapat 3 komponen dari sikap politik yaitu: Komponen Kognitif, Komponen Afektif, Komponen Evaluatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian berdasarkan wawancara. Dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penentuan sikap partai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Partai PKS dan Partai PAN Menghormati keputusan hasil keputusan Partai Gerindra, berikhsap legowo atas keputusan Partai Gerindra, mengembalikan pada keputusan urusan rumah tangga Partai Gerindra serta faktor yang mempengaruhi untuk elektabilitas partai Gerindra serta strategi untuk pemilihan presiden 2024 yang akan datang.

Kata kunci: Sikap Politik, Koalisi, Pemilihan Presiden

ABSTRACT

Coalition is basically formed because of the common goals to be achieved by each group, in this case political parties. In the political context, the coalition formed before the general election takes place, aims to gather strength and votes to win the election. In the 2019 presidential election, there were 2 political camps that fought, after the appointment of the President and Vice President, especially in the formation of the Jokowi cabinet volume II or the Cabinet of the Ministry of Advanced Indonesia. After the general election period is over, the coalition of political parties then continues to run the government with the support of the political parties that are members of the coalition. the political dynamics that occurred during the formation of the ministerial cabinet in the position of the defense minister who was appointed was Prabowo Subianto who was the general chairman of the Gerindra Party which in yesterday's PILPRES the Gerindra Party with the PKS Party and the PAN Party in a coalition against the coalition that carried Jokowi-Ma'ruf Amin because it's an interesting thing to research. This research is entitled "Political Attitudes of the Prabowo-Sandi Supporting Party Against the Merging of the Gerindra Party to the Maju Indonesia Coalition" the purpose of this study is to find out how the attitude of the PKS and PAN Political Parties after the joining of the Gerindra Party to the Maju Indonesia Coalition and leaving the previous Coalition. And the factors that influence the joining of the Gerindra party to the Indonesia Maju coalition. The theory used is the theory of Almond and Verba in that theory there are 3 components of political attitudes, namely: Cognitive Components, Affective Components, and Evaluative Components. This type of research is descriptive with a qualitative approach, namely research based on interviews. With in-depth interviews, observation, and documentation techniques with parties directly involved in determining the party's attitude. The results of this study indicate that the attitude of the PKS Party and the PAN Party Respect the decisions made by the Gerindra Party, be grateful for the Gerindra Party's decision, return to the Gerindra Party's household affairs decisions and the factors that influence it for the electability of the Gerindra party and the strategy for the upcoming 2024 presidential election.

Keywords: *Political Attitude, Coalition, Presidential Election*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrohmatullahiwabarakatu

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Karena atas berkah, rahmat dan hidayah-nya Skripsi yang berjudul “Sikap Partai Politik Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk tugas akhir sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Dengan demikian, atas terselesaikannya skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada :

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.A sebagai Rektor Universitas Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, Ma sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN RF Palembang;
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai wakil Dekan I FISIP UIN RF Palembang;
4. Ainur Ropik, M.Si sebagai wakil Dekan II FISIP UIN RF Palembang;
5. Dr. Kun Budianto, M.Si Sebagai wakil Dekan III FISIP UIN RF Palembang
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag. M. Hi sebagai ketua Prodi Ilmu Politik Ryllian Chandra, MA sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik
7. Dr. Andi Chandra Jaya, M. Hum selaku pembimbing I yang selalu memberikan masukan, dan semangat bagi perbaikan Skripsi ini;
8. Reni Apriani. M.Si selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan masukan, dan semangat bagi perbaikan Skripsi ini;
9. Seluruh Staf Pegawai Administrasi FISIP UIN RF Palembang;
10. Orang tua, Sudara dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi semangat, dan dukungan kepada penulis;
11. Para informan kader-kader partai PKS dan partai PAN yang telah membantu melengkapi hasil penelitian;
12. Sahabat-sahabat dan teman dekat yang telah senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dan menyemangati penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

14. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian dan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 14 juni 2021
Penulis,

Muhammad Fajri
NIM 1657020075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan/metode penelitian	12
2. Data dan Jenis Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Lokasi Penelitian	14
5. Teknik Analisis Data	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN.....	18
A. Sikap Politik Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Politik	22
B. Sikap Politik Etnis	22
C. Partai Politik dan Koalisi (perbedaan sikap partai)	23
D. Perbedaan Sikap Partai Politik Pendukung Presiden SBY	24

E. Partai Politik dan Koalisi Pemerintahan	24
F. Koalisi Partai Islam di Indonesia	24

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....31

A. Gambaran Umum Kota Palembang	31
B. Gambaran Umum Partai PKS Kota Palembang	37
C. Gambaran Umum Partai PAN Kota Palembang	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN47

A. Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju	49
1. Komponen Kognitif	49
2. Komponen Afektif	52
3. Komponen Evaluatif	57
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju Menurut Partai PKS dan Partai PAN	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....69

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kecamatan di Kota Palembang.....	33
Tabel 3.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang.....	34
Tabel 3.3 Jarak Dari Kecamatan ke Kota Palembang(KM).....	35
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kota Palembang Berdasarkan Kecamatan.....	37
Tabel 3.5 Kepengurusan DPP PKS Kota Palembang	40
Tabel 3.6 Kepengurusan DPP PAN Kota Palembang.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kota Palembang	32
Gambar 3.2 Lambang Partai PKS	39
Gambar 3.3 Lambang Partai PAN	43
Gambar 3.4 Kantor DPD PAN Kota Palembang	45
Gambar 4.1 Rakorwil PKS SUMSEL.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Koalisi pada dasarnya dibentuk karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh masing-masing kelompok, dalam hal ini partai politik. Dalam konteks politik, koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan umum berlangsung, bertujuan untuk menggalang kekuatan dan suara untuk dapat memenangkan pemilu. Setelah masa pemilihan umum selesai koalisi partai politik kemudian berlanjut untuk melancarkan jalannya pemerintahan dengan dukungan dari partai politik anggota koalisi. Hal tersebut yang sebenarnya ingin dicapai oleh partai politik yang tergabung dalam sebuah koalisi, namun beberapa faktor menjadi kendala bagi terciptanya tujuan bersama. Seperti misalnya latar belakang pembentukan koalisi, platform yang dimiliki partai politik yang tergabung dalam koalisi, dan latar belakang sebuah partai politik untuk tergabung dalam koalisi.

Keharusan untuk membentuk koalisi merupakan konsekuensi dari diterapkannya sistem presidensialisme yang kemudian digabungkan dengan sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia pasca pemerintahan Soeharto. Konsolidasi politik menjadi salah satu hal penting bagi partai politik saat menjalankan pilihannya baik sebagai partai penguasa ataupun partai oposisi. Dalam tahapan menuju konsolidasi, misalnya pada tahap persiapan menghadapi pemilu dengan melakukan konsolidasi kekuatan menjelang pemilu. Kemudian tahap konsolidasi dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan strategi politik. Karena tanpa konsolidasi kekuatan politik yang kuat akan menjadi lemah dan mengalami dilema.

Pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia dilakukan dengan rentang 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemungutan suara yang *independent*. Dengan demikian, jelaslah bahwa negara Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini menganut sistem presidensial.

Presidential threshold adalah ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas syarat pencalonannya adalah pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi, yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai persentase tertentu (Ridwan, 2019).

Pada Pilpres 2019 lalu, telah menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan konsep *Presidential threshold*. Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 lalu membuat peta koalisi besar di Indonesia, yaitu koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin dan koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. Koalisi Indonesia Maju merupakan koalisi internal yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang di prakasi oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PPP, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai PSI, Partai Perindo, Partai PKPI, dan PBB.

Sedangkan Koalisi Indonesia Adil Makmur merupakan koalisi di luar pemerintahan yang mendeklarasikan dirinya sebagai koalisi yang akan menantang petahana pada Pemilu 2019 lalu. Koalisi Indonesia Adil Makmur dibangun oleh 4 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai PKS, Partai PAN, dan Partai Demokrat yang di detik-

detik terakhir memutuskan untuk bergabung ke koalisi Indonesia Adil Makmur.

Ketetapan Partai PKS dan Partai PAN dalam poros koalisi Indonesia Adil Makmur memang sudah terlihat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu. Akan tetapi pada saat itu Partai PAN sempat bergabung ke koalisi pemerintahan, di PILPRES 2019 Partai PAN kembali masuk ke dalam koalisi Partai Gerindra untuk melawan pasangan Petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pada saat terbentuknya koalisi partai Gerindra. Partai PKS memang sudah menyatakan bahwasannya Partai PKS sebagai mitra koalisi dari Partai Gerindra dan akan menjadi koalisi tetap didalam poros Partai Gerindra. Partai PKS melihat bahwa figur tokoh bangsa Prabowo Subianto masih memiliki elektabilitas yang masih tinggi dikalangan masyarakat dan Partai PKS meyakini bahwa Prabowo masih bisa bertarung dalam Pilpres 2019. Sementara itu Partai PAN yang akhirnya bergabung ke koalisi Partai Gerindra juga meyakini bahwa Partai Gerindra masih memiliki figur CAPRES yang masih memiliki elektabilitas tinggi hal ini yang membuat Partai PAN sangat yakin bahwa kemenangan dalam pertarungan PILPRES akan di menangkan oleh Prabowo.

Partai PKS dan Partai PAN juga telah menerima keputusan dari partai Gerindra bahwa CAWAPRES yang masing-masing dari setiap partai mengajukan dibatalkan dan lebih memilih Sandiaga Uno untuk mendampingi Prabowo. Kedua partai yakin bahwa Sandiaga Uno mampu memegang amanah yang telah diberikan.

Dalam Pilpres 2019 yang telah dilakukan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih kepada Jokowi-Ma'ruf dengan perolehan suara sebanyak 55.4% sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya memperoleh

44.5%. Dari hasil tersebut, Jokowi-Ma'ruf meraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai presiden Indonesia terpilih (detik.com, 2020).

Namun, setelah ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam pembentukan kabinet Jokowi jilid II atau Kabinet Kementerian Indonesia Maju. Hal mengejutkan datang dari lawan politik Jokowi-Ma'ruf, yaitu hadirnya Prabowo dalam susunan kabinet tersebut yang notabene sebagai CAPRES dan lawan bertarung Jokowi sendiri. Disamping itu juga, Prabowo sebagai CAPRES dan juga sebagai ketua umum Partai Gerindra sebagai partai politik yang memprakasi dalam membentuk koalisi bersama partai-partai politik lainnya. Namun pada akhirnya memilih dan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf (detik.com, 2020).

Hal ini juga yang diungkapkan oleh sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, bahwa koalisi Prabowo-Sandi resmi bubar setelah gugatan PASLON 02 ke Mahkamah Konstitusi ditolak. Prabowo menyerahkan langkah politik selanjutnya ke masing-masing Partai Politik pendukung Prabowo-Sandi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sikap politik partai pendukung dengan bergabungnya partai politik

koalisi yang memprakasi berdirinya sebuah koalisi meninggalkan koalisinya dalam sebuah dinamika politik. Karena penelitian ini biar tidak terlalu melebar dalam mencari data dan mengumpulkan informasi terhadap informan maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pemahaman dalam membuktikan validitas dan keakuratan informasi yang diterima ataupun yang di kumpulkan, oleh karena itu dalam

mengumpulkan data peneliti hanya mewawancarai para petinggi partai yang mewakili sikap politik secara pribadi.

Dalam hal ini, menurut Sastroatmodjo perilaku politik adalah tidak mewakili sikap politik suatu organisasi. Dengan kata lain sikap politik seseorang baik ia sebagai pengurus partai sering terwujudkan dalam bentuk sikap tanggapan ataupun reaksi terhadap suatu realitas politik yang dihasilkan atau bersumber dari *kontemplasi* seseorang individu dalam suatu masyarakat ataupun organisasi.

Disini peneliti memfokuskan pada sikap politik dari Kader Partai PKS dan Partai PAN DPP Kota Palembang. karena sebagaimana kita ketahui bahwa kedua partai politik inilah yang sangat menggaungkan Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2019 dengan mengangkat judul penelitian “SIKAP POLITIK PARTAI PENDUKUNG PRABOWO-SANDI TERHADAP BERGABUNGNYA PARTAI GERINDRA KE KOALISI INDONESIA MAJU (Studi Kasus: Kader Partai PKS dan Partai PAN DPD Kota Palembang)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Sikap politik partai PKS dan PAN terhadap bergabungnya partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi bergabungnya partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai sikap politik partai PAN dan PKS terhadap bergabungnya partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu politik terkhusus mahasiswa jurusan ilmu politik, dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat didalam upaya dalam faktor-faktor yang mempengaruhi partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai acuan dan tinjauan pustaka. Tinjauan ini bertujuan untuk memenumkan sisi lain dari penelitian yang sedang penulis teliti, dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah membahas mengenai perspektif partai PAN dan PKS terhadap Bergabungnya partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju antara lain yaitu:

Pertama, skripsi dari Ridwan yang berjudul “*Persyaratan ambang batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential threshold) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Tinjau dari Fiqih Siyasaah dan Coattail effect.*” (Ridwan, 2019). Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang persyaratan pemilu dan koalisi bagi partai-partai yang kurang memenuhi syarat dalam Pemilu dengan membentuk sebuah koalisi agar mencapai ambang batas 20%.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif (*normative law reseach*) dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penulis perlu memahami heirarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yakni data hukum primer dan sekunder. Teknik perolehan data dengan teknik studi kepustakaan (*library reseach*) dan dokumntasi yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan deksriptif.

Kedua, skripsi dari Quwatul Mudrikatiz Zakiyah yang berjudul “*Partai Politik dan Koalisi Pemerintahan.*” (Mudrikatiz Zakiyah, 2017). Persamaan dari penelitian ini adalah sikap yang diambil dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, dalam terbentuknya sebuah koalisi partai adalah merupakan hasil dari keputusan bersama para elite partai politik untuk sebuah kepentingan partai politik dalam dinamika jalan roda pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan teori partai politik dan koalisi. Kemudian teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Ketiga, skripsi dari Subhan yang berjudul "*Koalisi Partai Politik (studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik dari pemerintahan Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno Putri)*"(Subhan,2017). Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang perubahan koalisi partai politik serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perubahan koalisi partai politik tersebut dalam pemilu yang menggunakan sistem multi-partai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter yang kemudian pengolahan data melalui kepustakaan serta penyajian dengan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikelola tersebut.

Keempat, skripsi dari Mohammad Andhika Yusmana yang berjudul "*Partai Politik dan Pemilu Sikap Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Menanggapi presidential Threshold 2019*".(Mohammad Andhika Yusmana

,2020) Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang sikap politik yang melatar-belakangi terhadap partai-partai yang membuat suatu koalisi

serta cara kerja sebuah koalisi partai politik. Sistem kepartaian multi-partai di Indonesia memiliki implikasi politik terhadap konfigurasi dan pola koalisi dilembaga eksekutif dan legislatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Serta pengkajian data-data yang berupa dokumen dengan menganalisis dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai data sekunder.

Kelima, jurnal dari R. Widya Setiabudi Sumadinata yang berjudul “*Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014.*”(Widya Setiabudi,2014). Persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana sebuah partai yang awalnya menjadi koalisi oposisi pemerintahan yang pada akhirnya setelah pemilihan umum bergabung menjadi koalisi pemerintahan ke dalam jalannya roda pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis dengan melihat variabel partai-partai besar politik dalam pengambilan keputusan untuk membentuk sebuah koalisi.

F. KERANGKA TEORI

Istilah “Sikap politik” dalam sebuah koalisi partai politik merujuk pada langkah politik yang akan di ambil untuk penentuan langkah politik selanjutnya. Koalisi politik umumnya terjadi ketika suatu kumpulan organisasi ataupun kesatuan bersepakat untuk merealisasikan suatu tujuan yang merupakan tujuan bersama. Koalisi tersebut dapat dibentuk untuk jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek.

Fenomena pergeseran partai politik dalam sebuah koalisi sering terjadi ketika koalisi yang telah dibentuk tidak mendapatkan hasil secara maksimal dengan kata lain. Ketika kepentingan partai politik tidak didapatkan sering membuat sebuah koalisi pecah artinya partai politik akan mencari koalisi

baru. Koalisi yang banyak terbangun di Indonesia merupakan koalisi yang cair dan rapuh (dapat berubah-ubah). Tidak satu pun koalisi yang menghasilkan paduan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomuos*), dan tahan lama (*durable*) (Cipto, Bambang; 2000).

Dorongan actor partai politik ataupun elite partai politik dalam sebuah sikap politik yang di ambil ketika tidak mendapatkan hasil maksimal dalam sebuah koalisi partai politik sering membuat pergeseran peta koalisi partai politik untuk mewujudkan tujuan partai.

Sikap politik sendiri dapat dinyatakan sebagai “kesiapan untuk beraksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut”. Munculnya sikap politik tersebut akan diperkirakan perilaku politik apa yang sekiranya akan muncul. Akan tetapi politik juga tidak selamanya mewakili sikap politik seseorang walaupun sikap lebih abadi dari pada pikiran atau suasana hati yang fana, namun sikap cenderung berubah sesuai dengan berlakunya waktu dan dengan berubahnya keadaan dan cenderung di pengaruhi oleh berbagai macam motif. (karena sikap itu sifatnya insidensial) tergantung dari kondisi atau peristiwa yang mendukung dengan melatar belakanginya (Sandi, Alfari; 2019)

Adapun dalam menjelaskan sebuah sikap politik penulis menggunakan teori sikap politik dari Almond dan Verba yang mengemukakan sikap politik terhadap langkah politik. Almond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan politik individu tentang objek politik terdapat tiga komponen utama di dalam sikap politik. Sikap individu terhadap objek politik dapat dilihat dari tiga komponen berikut:

Komponen kognitif: yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan

segala kewajibanya. Yang artinya actor politik ataupun partai politik sendiri mempercayai pada sebuah pengambilan keputusan oleh partai politik dalam menghadapi situasi politik yang sedang berjalan

Komponen Afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilanya. Dilihat dari aspek ini, maka actor atau elite politik dimungkinkan untuk memiliki perasaan subjektif terhadap langkah politik. Sehingga ia dapat menerima ataupun menolak langkah politik secara keseluruhan

Komponen Evaluatif, yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Keputusan dan pendapat actor atau elite politik ini ditentukan oleh kemampuannya dalam menilai moralitas politik pengetahuan dan cara-cara dalam menilai sebuah langkah politik yang di ambil.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat diatas, sikap politik dalam penelitian ini adalah sikap politik yang bersifat internal dari actor atau elite partai politik yang diwujudkan dalam bentuk tanggapan atau pendapat-pendapat untuk bereaksi terhadap objek atau situasi politik, yang melibatkan komponen kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap objek atau situasi politik.

G. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika di belakang mereka, para peneliti

perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi. berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode ini karena penelitian ini cocok diteliti dengan metode tersebut.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, dalam penelitian ini letak deskriptif-nya adalah berupa uraian kalimat yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar ada serta berkaitan dengan bagaimana perspektif partai PAN dan PKS terhadap bergabungnya GERINDRA ke kolasi Indonesia Maju. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkap dan dijelaskan secara linguistik, bahasa atau kata-kata

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data *primer* adalah data yang di peroleh dari informen (orang yang memberikan informasi) dalam penelitian ini yaitu: kader dari partai PAN sebanyak 3 orang narasumber dan 3 orang narasumber dari kader PKS. Kepada informen akan ditanyakan bagaimana perspektif dari

partai PAN dan PKS terhadap bergabungnya GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju.

Kemudian data *sekunder*, data ini merupakan data pendukung/penunjang dari data *primer* seperti buku, jurnal, himbauan-himbauan, foto-foto, dokumen, dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan bagaimana Sikap politik partai PAN dan PKS terhadap bergabungnya GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam penelitian ini mewawancarai kader dari partai PAN dan PKS. Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi

yang rinci, berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi dari objek penelitian. Setelah itu peneliti akan mencatat atau merekam baik rekaman suara ataupun video sesuai kebutuhan lapangan untuk menjadi bukti dan data dari hasil wawancara tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya tertulis yang semuanya itu dapat memberikan informasi bagi proses penelitian yang berhubungan dengan

perspektif partai PAN dan PKS terhadap bergabungnya GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam mengungkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi ini merupakan penentuan yang ditentukan oleh peneliti dengan sengaja. Cara penentuan lokasi yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan substansi dan melihat lapangan untuk mencari kebenaran sebagai pertimbangan untuk dijadikan lokasi penelitian. (Melolog, 2001:86)

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor DPW Partai PAN dan PKS kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya, sedangkan fokus dari penelitian adalah perspektif partai PAN dan PKS terhadap bergabungnya partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisa data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya, didalam analisis data kualitatif.

Analisis data yaitu merupakan cara seseorang peneliti dalam mengelola data yang telah diperoleh sehingga dapat memecahkan masalah dan kemudian menarik kesimpulan dari penelitiannya. Karena data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tidak bisa digunakan begitu saja. Dalam penelitian analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data yang telah diperoleh dapat mempermudah membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang ditemui dalam penelitian.

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Empat tahap tersebut didefinisikan sebagai berikut.

1. *Pengumpulan data* melalui wawancara dari informan, data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap, serta dokumentasi, hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan,
2. *Reduksi data* adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan, bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. pada tahap ini, peneliti menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan.
3. *Penyajian data* berupa aktifitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh, penyajian data

cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

4. *Penarikan kesimpulan* merupakan proses aktifitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya yaitu data yang telah direduksi atau yang telah disajikan, pada tahap ini peneliti bertugas menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi deksripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian. sistematika laporan yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang di rangkum dalam 4 bab, yaitu:

Bab pertama, terlebih dahulu diuraikan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian , dan sistematika penulisan laporan.

Bab kedua, bab ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pada bab ini lebih fokus pada kajian berbagai pihak secara teoritis tentang fokus masalah yang diangkat.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan secara rinci mengenai lokasi dari objek yang diteliti. Penggambaran lokasi penelitian mengikuti topik yang diteliti, dengan kata lain tidak semua aspek dari objek yang diteliti harus dijelaskan. Penekanan adalah

pada aspek mana yang paling diperlukan dan terkait dengan objek yang diteliti.

Bab keempat, menganalisis hasil data yang didapatkan akan dikaitkan dengan temuan dilapangan dan pertanyaan peneliti yang sudah dituliskan di dalam bagian pendahuluan, kemudian data yang diperoleh oleh peneliti akan dibahas bagaimana keterkaitannya dengan teori yang sudah ada. Serta menjelaskan hasil temuan berdasarkan sudut pandang subjek dengan sudut pandang teoritis.

Bab kelima, pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang berisi penjelasan singkat terhadap pertanyaan pada perumusan masalah. Pada bagian saran, peneliti memberikan saran berupa rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pihak yang diteliti ataupun masyarakat luas. Saran akan berupa analisa yang kongkrit, bukan bersifat saran teknis.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitiannya yang membahas mengenai “sikap politik partai pendukung prabowo-sandi terhadap bergabungnya partai gerindra ke koalisi indonesia maju” yang telah banyak dibahas beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki kaitan dan juga perbedaan.

Yang pertama penelitian skripsi dari Giah Noor Saputra (2007) yang berjudul *Sikap Politik Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Politik Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla* (Giah Noor Syahputra, 2007).

Penelitian tersebut menggunakan teori politik behavior, *Political behavior* menjadi suatu bentuk perilaku yang dilakukan individu maupun kelompok dengan tujuan memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Ada berbagai perilaku politik yang bisa kita amati di Indonesia saat ini, salah satu contohnya adalah mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik.

Tujuan utama *political behavior* terletak pada untuk memahami dan menggambarkan berbagai fenomena politik secara realistis, bukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (SP. Varma, 1992:95). Dengan kata lain, tujuan utama yakni perilaku politik menjadi suatu ilmu pengetahuan demi kepentingan ilmu pengetahuan. Pendekatan behavioralisme sebenarnya lebih menjelaskan mengapa gejala politik tertentu terjadi seperti itu, atau dengan kata lain pandangan politik yang apa adanya.

Substansi dari behavioralisme terletak pada data yang validitasnya didasarkan atas observasi atau pengamatan melalui

penggunaan panca indera atau peralatan mekanis. Sesungguhnya peran dari metode-metode perilaku politik ini dapat menyelesaikan banyak hal, terutama pada aspek penyelidikan, hipotesa, atau dugaan ilmiah (SP. Varma, 1992:56).

Dalam pendekatan ini, maka dapat dikatakan bahwa perilaku tidak hanya dalam kondisi tertentu, tetapi juga dapat dalam perilaku di masa sekarang, masa depan, atau masa lampau, serta perilaku apa yang seharusnya. Pendekatan yang

termasuk behaviorisme adalah kekuasaan, konflik, dan fungsionalisme. Suatu negara demokrasi, kedaulatan merupakan sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Sesungguhnya indikator perkembangan politik suatu negara dilihat dari konsep demokrasi itu sendiri.

Jenis penelitian tersebut menggunakan metode library research, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan sikap politik koalisi merah putih terhadap kebijakan politik Pemerintahan Joko Widodo. Penelitian tersebut menggunakan penelitian sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Yang kedua Penelitian Jurnal dari Tsuwoyo Admojo yang berjudul "*sikap politik etnis jawa terhadap pencalonan ardian saputra-dewi arimbi dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu tahun 2017 (studi kasus : Pekon Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)*" (Tsuwoyo Admojo,2017).

Penelitian ini menggunakan teori konsep budaya politik. Konsep budaya politik merujuk pada sikap politik dan pola perilaku penduduk,

dimana budaya ini sangat menentukan hubungan antara warga negara dengan sistem politik (Marijan

2013:335). Gabriel Almond dan Verba mengartikan kebudayaan politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik antara masyarakat bangsa itu.

Istilah kebudayaan politik mengacu pada orientasi politik sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan individu itu sendiri dalam sistem tersebut. Setiap masyarakat memiliki budaya politiknya sendiri, begitu juga dengan individu-individu yang ada ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Mereka senantiasa memiliki sikap, orientasi, dan persepsi terhadap sistem politiknya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat menilai tempat dan peranannya sendiri dalam sistem politik.

Terdapat tiga tipe kebudayaan politik yaitu:

1. Kebudayaan Politik Parokhial Merupakan kebudayaan politik dengan tingkat kesadaran terhadap objek politik yang rendah atau dalam skala Almond dan Verba mendekati nol. Orientasi parokhial ditandai pula oleh tiadanya harapan akan perubahan yang datang dari sistem politik, maksudnya kaum parokhial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik;
2. Kebudayaan Politik Subjek Merupakan kebudayaan politik dengan frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politik dan output dari sistem politik dengan diferensiasi yang luas. Namun, orientasi terhadap objek-objek input secara khusus dan diri sendiri (individu) sebagai partisipan politik aktif mendekati nol atau rendah. Artinya, orientasi terhadap sistem

dan outputnya tinggi, sedangkan terhadap input terlebih dalam individunya masih rendah;

3. Kebudayaan Politik Partisipan Merupakan kebudayaan politik dimana individu-individu bersikap aktif dan terlibat dengan sistem politik secara utuh (komprehensif) baik dalam proses input maupun outputnya (Almond dalam Handoyo 2013:228- 231)

Yang ketiga penelitian skripsi dari Erika Sita Prasasti (2017) yang berjudul *PARTAI POLITIK DAN KOALISI (Perbedaan Sikap Partai Keadilan Sejahtera [PKS] dengan Sesama Pendukung Pemerintah SBY Periode 2009-2014)* (Erika Sita Prasasti,2017).

Penelitian tersebut menggunakan teori koalisi, Menurut (Shively), koalisi adalah gabungan beberapa kelompok untuk mengendalikan dan menghimpun kekuasaan sehingga kepentingan mereka dapat terakomodasi. Koalisi juga berarti sebuah persetujuan formal yang memiliki kontrak bersama diantara dua partai politik atau lebih yang dilakukan untuk menjamin kekuasaan pemerintah atas dasar suara mayoritas dalam mempertahankan stabilitas jalannya pemerintahan.

Di Indonesia, dorongan untuk membentuk sebuah koalisi memiliki landasan hukum yang cukup kuat yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal

6A ayat 2 yang menyebutkan bahwa “calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum”.⁸ Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 9 yang berbunyi:

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.”⁹ Koalisi memiliki beberapa bentuk atau tipe yang dapat dibedakan dari jumlah partai politik atau kursi di parlemen yang tergabung ke dalam koalisi tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Arend Lijphart dalam *Pattern of Democracy* dan dikutip oleh Syamsuddin Haris bentuk atau tipe koalisi tersebut yaitu koalisi besar atau gemuk, koalisi pas terbatas dan koalisi kecil, berikut penjelasannya:

a. Koalisi Besar atau Gemuk

Koalisi besar atau gemuk dalam pembentukannya mengikutsertakan hampir semua partai politik ke dalam koalisi, sehingga di dalam koalisi tersebut terdapat jumlah partai politik yang melebihi dari yang diperlukan untuk mencapai dukungan mayoritas dari parlemen.¹² Dengan begitu, pemerintahan yang berjalan akan mendapat dukungan mayoritas mutlak dari partai politik di parlemen.¹³ Namun tipe koalisi ini kemudian menyebabkan adanya tawar-menawar kepentingan dan sulit untuk disatupadankan, karena terlalu banyak partai politik yang tergabung dalam koalisi. Koalisi besar atau gemuk ini dapat dilihat dalam koalisi pendukung pemerintah SBY periode 2009-2014 yang mencakup enam (6) partai politik dan 423 dari 560 (75,5%) kursi di parlemen.

b. Koalisi Pas Terbatas

Koalisi pas terbatas dibentuk hanya untuk mencapai dukungan mayoritas sederhana (50%+1) di parlemen tanpa mengikutsertakan

partai politik yang tidak diperlukan untuk mencapai dukungan mayoritas dari parlemen. 14 Dengan begitu, partai politik yang bergabung ke dalam koalisi jumlahnya terbatas hanya untuk mencapai kekuatan politik yang diharapkan agar dapat menguatkan jalannya pemerintahan.¹⁵ Koalisi pas terbatas ini menjadi bentuk koalisi yang ideal karena dukungan mayoritas sederhana di parlemen dapat membantu jalannya pemerintahan dan dapat menciptakan interaksi yang konstruktif antara presiden dan parlemen.

c. Koalisi kecil

koalisi kecil merupakan koalisi yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen, sehingga dapat menciptakan pemerintahan terbelah ketika eksekutif dan legislatif dipimpin oleh kekuatan partai politik yang berbeda dan membuat pemerintahan yang berjalan menjadi tidak efektif bahkan dapat terjadi pemakzulan terhadap presiden.

Yang keempat penelitian skripsi dari Rif'atul Mahmudah (2011) yang berjudul "*Perbedaan sikap Partai politik pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Studi kasus hak angket DPR-RI tentang pengusutan kasus Bank Century (2009-2010)*" (Rif'atul Mahmudah,2011)

Penelitian ini menggunakan teori koalisi Partai politik, Koalisi partai politik merupakan bentuk kohesivitas partai-partai politik dalam suatu negara. Menurut Lawrence C. Dodd, dalam sistem multipartai, partai- partai yang ada harus masuk ke dalam koalisi dengan partai- partai lain dalam rangka memperoleh kekuasaan dan pemegang kontrol. Untuk mencapai kepentingan memperoleh kontrol atas pemerintahan dalam mayoritas bersama,

partai yang berkoalisi harus meninggalkan ideologi awal mereka demi tercapainya kebersamaan. (Dodd, 1975:35)

Menurut para ahli, terdapat terdapat beberapa macam bentuk koalisi, di antaranya adalah sebagai berikut seperti yang disebutkan oleh Arend Lijphart dalam bukunya *Patterns of Democracy*. (Lijphart, 1999:91-95)

1. *Minimal Winning Coalitions (size principles)*

Teori ini dikemukakan oleh William H. Riker dengan menggunakan prinsip ukuran dalam pembentukan koalisi. Menurut Riker, jumlah partai yang diperlukan adalah sejauh mampu mencapai status mayoritas, meski hanya terdiri atas dua atau tiga partai saja. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa partai politik berambisi untuk memaksimalkan kekuatannya.

2. *Minimum Size Coalitions*

Teori ini adalah pengembangan dari teori *Minimal Winning Coalitions*, tetapi diberikan kriteria tambahan agar dapat lebih spesifik dalam memprediksi. Teori ini didasarkan pada asumsi yang sama dengan teori sebelumnya tetapi lebih rasional untuk menarik kesimpulan. Kemudian jika partai politik berkeinginan untuk tidak memasukkan partai yang tidak sama garis pemikirannya maka, mereka harus mengamankan dahulu sebagai partai mayoritas.

3. *Coalition with the Smallest Number of Parties*

(bargaining proposition)

Teori yang dikeluarkan oleh Michael Leiserson ini memiliki perbedaan. Teori ini disebut dengan '*bargaining proposition*'. Menurutnya teori *Minimal Winning Coalitions* cenderung berpotensi

akan memasukkan keterlibatan partai kecil sedangkan menurutnya, koalisi akan lebih mudah diatur dengan jumlah partai yang sedikit. Karena hal tersebut, terbentuknya koalisi yang terdiri atas dua partai dengan suara tidak jauh berbeda tetapi mampu mencapai mayoritas akan lebih baik.

4. *Minimal Range Coalitions*

Teori sebelumnya merupakan teori koalisi berdasarkan ukuran dan jumlah partai politik tetapi dengan tidak mengindahkan program dan preferensi kebijakan mereka. Berbeda dengan teori tersebut di atas, teori ini mempertimbangkan aspek preferensi kebijakan dan persamaan program, meskipun tidak benar-benar dekat dan masih terdapat perbedaan tetapi perbedaan tersebut bukan perbedaan yang ekstrem. Teori ini menjelaskan bahwa koalisi gabungan antara beberapa partai politik yang memiliki perbedaan minimum dengan mempertimbangkan hal di atas lebih mudah terjaga 'kekompakan' dan kesolidannya jika dibandingkan dengan koalisi partai yang hanya mengedepankan jumlah atau besarnya suatu partai.

5. *Minimum Connected Winning*

Teori ini merupakan teori koalisi menang 'terhubung' minimum (*minimum connected winning*). Teori ini dijelaskan oleh seorang tokoh yang bernama Robert Axelrod. Dalam teori koalisinya ini, Axelrod menjelaskan bahwa koalisi akan terbentuk ketika antarpolisi memiliki kedekatan dalam hal kebijakan. Partai yang tidak memiliki kesesuaian preferensi kebijakan tidak akan bisa bergabung ke dalam koalisi ini.

6. *Policy-viable coalitions*

Dalam teori ini, fokus sebuah koalisi adalah pada kebijakan, bukan memperoleh kedudukan di pemerintahan. Kekuatan dalam koalisi ini dapat dilihat ketika dalam parlemen kekuatan mayoritas membuat kebijakan, bukan dalam kabinet.

Yang kelima penelitian skripsi dari Quwatul Mudrikatiz Zakiyah (2017) yang berjudul *PARTAI POLITIK DAN KOALISI PEMERINTAHAN (Studi atas Dampak Konflik Elite Partai GOLKAR Tahun 2014-2016 terhadap Dukungan Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)* (Quwatul Mudrikatiz,2017).

Penelitian ini menggunakan teori koalisi politik, Andrew Heywood menjelaskan bahwa koalisi merupakan bentuk pengelompokan aktor-aktor politik yang terbentuk baik itu atas kesamaan persepsi tentang musuh bersama (*common threat*), atau atas dasar keyakinan bahwa tujuan mereka tidak dapat tercapai jika berjalan sendiri-sendiri. Maka pemerintahan koalisi (*coalition government*) merupakan kesepakatan formal antara dua atau lebih partai politik yang mencakup distribusi kursi kementerian lintas partai di kabinet pemerintahan. (Simarmata, 2014:12)

Dalam sistem politik yang bersifat multipartai, koalisi merupakan suatu bentuk keniscayaan. Michael Laver melihat perspektif teori pilihan-rasional melalui dua pendekatan umum yang menjelaskan mengapa partai-partai politik melakukan koalisi, yaitu *office-seeking* dan *policy-seeking*. Lalu, Karee Storm menambahkan satu perspektif lagi yaitu *vote-seeking*. Sedangkan William Riker berasumsi bahwa koalisi partai politik didorong oleh hasrat untuk mendapat kekuasaan baik dari ranah eksekutif maupun legislatif (*office seeking*). (Sumandinata, 2014: 183).

Pada dasarnya pembentukan sebuah koalisi politik akan lebih banyak memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi dan terhadap efektivitas kebijakan. Substansi politik adalah sarana bagi pencapaian tujuan bersama, yang berarti semakin kita dapat mengagregasikan dukungan, antara lain dalam suatu bentuk koalisi “permanen” (tetap) yang tidak oportunis akan semakin besar kemungkinan untuk mencapai tujuan bersama itu serta menjalankan roda pemerintahan yang kuat, guna memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang keenam penelitian Skripsi dari Dita Adistia (2016), yang berjudul “*Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015*” (Dita Adistia,2016).

Penelitian ini menggunakan teori sikap dan sikap politik. Sikap politik adalah sikap dan tingkah laku kecenderungan seseorang untuk bertindak (diam juga merupakan sikap) terhadap situasi atau keadaan. Adanya rasa terdorong untuk mengubah suasana lingkungan yang ditentukan oleh apa yang terkandung dalam dirinya sendiri seperti idealisme, nasionalisme dan lain-lain (Alfian, 1982:134-135).

Menurut Soewondo sikap politik diartikan sebagai kesiagaan mental yang diorganisir lewat pengalaman yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan seseorang terhadap orang lain. Objek, situasi yang berhubungan dengannya, menurut ahli tersebut sikap mempunyai hubungan yang erat dengan nilai dalam arti bahwa nilai-nilai dapat digunakan sebagai suatu cara untuk mengeluarkan jumlah sikap.

Sikap seseorang dapat menyatukan perasaan setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan pola yang menentukan pandangan tentang dunia (Dedi Kurniawan, 2012:22). Sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Adanya sikap politik tersebut akan diperkirakan perilaku politik apa yang sekiranya akan muncul.

Akan tetapi, perilaku politik juga tidak selamanya mewakili sikap politik seseorang (Sastroatmodjo, 1995:4-7). Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, sikap politik dalam penelitian ini adalah sikap politik yang bersifat internal yang diwujudkan dalam bentuk tanggapan atau pendapat-pendapat untuk bereaksi terhadap objek atau situasi politik, sebagai hasil dari penghayatan dari individu dalam masyarakat yang melibatkan komponen kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap objek atau situasi politik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik atau suatu objek politik, Almond dan Verbal dalam Sudjino Sastroatmodjo (1998:37-38) mengungkapkan tiga komponen, yaitu:

- a. Komponen kognitif, yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya.
- b. Komponen afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.

- c. Komponen evaluatif, yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Yang ketujuh penelitian jurnal dari Esty Ekawita yang berjudul *“KOALISI PARTAI ISLAM DI INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014”* (Esty kawita,2014).Penelitian ini menggunakan teori koalisi politik. Salah satu pelopor teori koalisi politik adalah William Riker yang menjelaskan tentang koalisi partai melalui teorinya Minimal Winning Coalitions (MWC). (Wardani, 2007:13) Menurut Riker, pemerintahan seharusnya dibentuk dengan koalisi yang menjamin kemenangan minimum. Beberapa asumsi dasar dari MWC adalah sebagai berikut:

1. Partai politik berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka, baik dalam kabinet maupun parlemen.
2. Yang dimaksud dengan MWC adalah diperlukannya jumlah kursi tertentu untuk mencapai kemenangan yang minimal (cukup 50%+1) di parlemen.
3. MWC cukup membutuhkan koalisi dua atau lebih partai yang dapat mengontrol kursi parlemen.

Tetapi minimal dalam arti mereka tidak memasukkan partai yang tidak perlu untuk mencapai kemenangan. Koalisi ini cukup menguasai mayoritas minimal kursi parlemen dengan mengeluarkan partai-partai yang memiliki kursi kecil. Adapun tujuan atau motif koalisi adalah bersifat office-seeking (memaksimalkan kekuasaan) (Kaare Strom, 1990:567). Abraham De Swaan mengajukan teori koalisi yang berorientasi pada kebijakan yang menekankan betapa pentingnya

ideologi partai dalam pembentukan koalisi (Peter Mair, 1995:5-28). Mendapatkan kekuasaan di pemerintahan bukanlah tujuan akhir dari politisi partai, namun merupakan sarana untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Sehingga ini memungkinkan bagi partai-partai yang memiliki ideologi kurang lebih sama untuk melakukan koalisi. (Ambardi, 2009:19) Teori ini berbeda dengan Katz dan Mair yang menyatakan bahwa semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka.

Teori-teori mengenai koalisi tersebut yang akan penulis gunakan untuk melihat kecenderungan partaipartai di Indonesia terutama partai Islam dalam melakukan koalisi.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang

Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683M) yang diketemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wilayah yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal

16 Juni 683 Masehi (tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 syaka).

Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.

Keunikan tempat itu selain hutan rimbanya yang lebat dan banyaknya danau-danau kecil, dan aneka bunga yang tumbuh subur, sepanjang wilayah itu dihuni oleh seorang dewi bersama dayang-dayangnya. Dewi itu disebut Putri Kahyangan. Sebenarnya, dia bernama Putri Ayu Sundari. Dewi dan dayang- dayangnya itu mendiami hutan rimba raya, lereng, dan puncak Bukit Barisan serta kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia.

Banyaknya sungai yang bermuara ke laut, maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk melalui sungai-sungai itu sampai ke dalam, bahkan sampai ke kaki pegunungan, yang ternyata daerah itu subur dan makmur. Maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk pedagang dari Cina dengan penduduk setempat. Daerah itu menjadi ramai oleh perdagangan antara penduduk setempat dengan pedagang. Akibatnya, dewi-dewi dari kahyangan merasa terganggu dan mencari tempat lain.

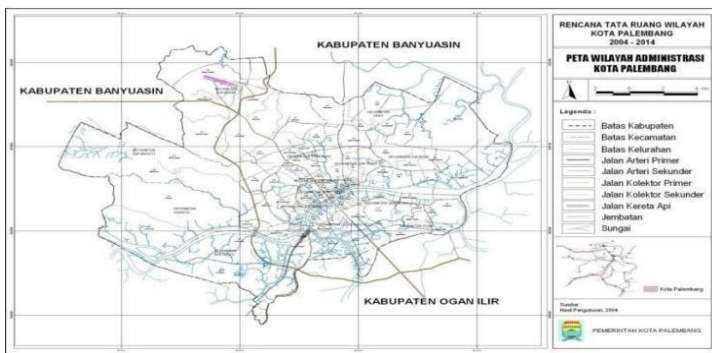
Saat itu Bukit Siguntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur dan aneka bunga tubuh di daerah

itu. Sungai Melayu tempat Bukit Seguntang Mahameru berada juga menjadi terkenal. Oleh karena itu, orang yang telah bermukim di Sungai Melayu, terutama penduduk kota Palembang, sekarang menamakan diri sebagai penduduk Sungai Melayu, yang kemudian berubah menjadi penduduk Melayu. Karena Bukit Seguntang Mahameru berdiam di Sungai Melayu, maka

Sang Sapurba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu. Anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut kegiatan di daerah Lembang. Nama Lembang semakin terkenal. Kemudian ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang. Dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah atau lokasi. Pertumbuhan ekonomi semakin ramai. Sungai Musi dan Sungai Musi Banyuasin menjadi jalur perdagangan kuat terkenal sampai ke negara lain. Nama Lembang pun berubah menjadi Palembang (Palembang.go.id,2019).

Lokasi dan peta Kota Palembang

Secara astronomis, Kota Palembang terletak antara 2o52’-3o5’ LintangSelatan dan 104o37’-104o52’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Palembang memiliki batas-batas: Utara, Timur, Barat- Kabupaten Banyuasin Selatan– Kabupaten Muara Enimdan Kabupaten OganIlir (Palembang.go.id,2019).



Gambar 3.1. Peta Kota Palembang

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kota Palembang terdiri dari 18 Kecamatan, yaitu:

Tabel 3.1. Kecamatan Kota Palembang.

1. Ilir Barat II	11. Seberang Ulu II
2. Kemuning	12. Sematang Borang
3. Gandus	13. Plaju
4. Ilir Timur II	14. Sukarami
5. Seberang Ulu I	15. Ilir Barat I
6. Kalidoni	16. Alang-Alang Lebar
7. Kertapati	17. Bukit Kecil
8. Ilir Timur III	18. Ilir Timur I
9. Jakabaring	
10. Sako	

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kedaaan Geografis

Kota Palembang terletak antara 2o52' sampai 3o5' Lintang Selatan dan 104o37' sampai 104o52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor

136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus

memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22km²/1,55%). Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 3.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palembang

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
	(1)	(2)	(3)
1	Ilir Barat II	6,22	1,55
2	Gandus	68,78	17,17
3	Seberang Ulu 1	8,28	2,07
4	Jakabaring	9,16	2,29
5	Kertapati	42,56	10,62
6	Seberang Ulu II	10,69	2,67
7	Plaju	15,17	3,79
8	Ilir Barat I	19,77	4,93
9	Bukit Kecil I	9,92	2,48
10	Ilir Timur I	6,50	1,62
11	Kemuning	9,00	2,25
12	Ilir Timur II	10,82	2,71
13	Ilir Timur III	14,76	3,68
14	Kalidoni	27,92	6,97
15	Sako	18,04	4,50
16	Sematang Borang	36,98	9,23
17	Sukarami	51,46	12,85
18	Alang-alang Lebar	34,58	8,63
	Total	400,61	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 3.3. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kota madya di Kota Palembang./KM

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kota madya
	(1)	(3)
1	Ilir Barat II	2.50
2	Gandus	11.00
3	Seberang Ulu 1	4.50
4	Jakabaring	14.00
5	Kertapati	8.90
6	Seberang Ulu II	5.10
7	Plaju	8.30
8	Ilir Barat I	4.40
9	Bukit Kecil I	2.10
10	Ilir Timur I	3.90
11	Kemuning	6.90
12	Ilir Timur II	4.80
13	Ilir Timur III	7.00
14	Kalidoni	6.10
15	Sako	9.50
16	Sematang Borang	9.50
17	Sukarami	11.00
18	Alang-alang Lebar	13.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan jarak lokasi Kecamatan yang paling terdekat dengan Ibu Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Bukit Kecil I dengan jarak 2,50 Km serta Kecamatan yang paling jauh dengan Ibu Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Jakabaring dengan jarak 14,00 Km.

Kependudukan

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 11.862 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/Km². Pada tahun 2019 badan pusat statistik Kota Palembang mengeluarkan data jumlah penduduk pada tahun 2019 yang terbagi berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Ilir Barat II	36.718	36.551	73.269
2.	Gandus	33.477	32.304	68.781
3.	Seberang Ulu I	48.087	47.164	95.251
4.	Kertapati	46.874	45.208	92.082
5.	Jakabaring	46.622	45.519	92.141
6.	Seberang Ulu II	53.919	53.182	107.101
7.	Plaju	45.438	45.297	90.735
8.	Ilir Barat I	70.697	70.848	141.545
9.	Bukit Kecil	24.742	25.560	50.301
10.	Ilir Timur I	38.669	40.600	79.269
11.	Kemuning	46.960	47.038	93.998
12.	Ilir Timur II	48.437	48.536	97.000
13.	Kalidoni	56.921	56.011	112.931
14.	Ilir Timur III	42.607	42.328	84.935
15.	Sako	46.666	46.660	93.329
16.	Sematang Borang	18.386	18.059	36.445
17.	Sukarami	79.559	78.687	158.246
18.	Alang-alang Lebar	49.397	49.140	98.537

Sumber: BPS Kota Palembang

B. Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada

20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. Pemilu 2019 menjadi pemilu kelima yang diikuti partai ini.

Kelahiran PKS erat kaitannya dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Gerakan ini ditandai dengan mulai maraknya kegiatan kajian Islam dan meluasnya penggunaan jilbab di kampus-kampus sekuler Indonesia pada era 1980-an.

- a. **Visi:** Menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. **Misi:** Menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang di Ridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TUJUAN DAN FUNGSI PARTAI PKS

Tujuan partai, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara Partai berfungsi sebagai:

- a. Wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik.
- b. Memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara, serta Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LAMBANG DAN TANDA PARTAI



Gambar 3.2 Lambang Partai PKS

Arti lambang sebagai berikut:

- I. Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
- II. Bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
- III. Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
- IV. Putih melambangkan bersih, suci, dan mulia.
- V. Hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.
- VI. Kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan, dan kejayaan.
- VII. PKS dengan warna hitam, singkatan dari PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

Dewan pimpinan Daerah Partai PKS Kota Palembang adalah salah satu struktur Partai PKS yang berada di tingkatan daerah Kabupaten/ kota yang berada dibawah kedudukan Partai PKS

tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PKS Nomor:02/SKEP/AF-PKS/1439 tanggal 01 Juni 2018, kepengurusan baru DPD Partai PKS kota Palembang resmi menjalankan tugas menggantikan kepengurusan yang lama dengan yang baru dalam Periode 2015-2020.

Tabel 3.5 Kepengurusan DPP PKS Kota Palembang

KETUA UMUM DPD PARTAI PKS KOTA PALEMBANG	MUHAMMAD RIDWAN, SH. MH
WAKIL KETUA UMUM DPD PARTAI PKS KOTA PALEMBANG	Hj. YULFA CINDO SARI, S. Th.I
SEKERTARIS UMUM DPD PARTAI PKS KOTA PALEMBANG	JUMONO, ST
BENDAHARA UMUM DPD PARTAI PKS KOTA PALEMBANG	EKA ERFANI, S. Si

Sumber : Wawancara Penulis dengan Narasumber



Kantor DPD PKS kota Palembang

A. Gambaran Umum Partai Amanat Nasional

Sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tak terlepas dari sosok Amien Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MAR) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru. Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.

Dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta, pendeklarasian partai ini dihadiri oleh ribuan massa. Pada saat itu puluhan tokoh-tokohnya tampil dipanggung, melambai-lambaikan tangan menyambut riuhnya tepuk tangan hadirin menandakan antusiasme masyarakat akan didirikannya PAN. Pengesahan pendirian PAN sendiri berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yang lahir di penghujung era orde baru, PAN pun didirikan dengan mengusung semangat Indonesia baru untuk menggantikan nuansa pemerintahan otoriter yang kental pada jaman orba.

- a. **VISI:** Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
- b. **MISI:**
 - a) Mewujudkan kader yang berkualitas.

- b) Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat
- c) Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.
- d) Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat.
- e) Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f) Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.

TUJUAN DAN FUNGSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Partai Amanat Nasional bertujuan mewujudkan Indonesia Baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai PAN juga berfungsi sebagai berikut:

- a. Menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- b. Menjadi alat perjuangan untuk menegakkan kedaulatan Rakyat
- c. Meyerap, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan Negara

- d. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender, dan
- f. Melakukan komunikasi Politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik serta membangkitkan partisipasi politik warga negara.

LAMBANG DAN TANDA PARTAI



Gambar 3. 3 Lambang Partai PAN

Arti lambang sebagai berikut:

Secara umum, lambang tersebut merupakan simbolisasi bahwa ZAN membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan yang lebih baik.

- i. Matahari melambangkan sumber cahaya dan sumber kehidupan
- ii. Warna putih merupakan ekspresi dari kebenaran, kadilan, dan semangat baru
- iii. Pancaran sinar merupakan refleksi dari kemajuan

- iii. Bujur sangkar berwarna biru tua merupakan cerminan laut dan langit yang merefleksikan kemerdekaan dan demokrasi

Dewan pimpinan Daerah Partai PAN Kota Palembang adalah salah satu struktur Partai PAN yang berada di tingkatan daerah Kabupaten/ kota yang berada dibawah kedudukan Partai PAN tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PAN **Nomor: PAN/06/A/KPTS/K-S/022/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016**, kepengurusan baru DPD Partai PAN kota Palembang resmi menjalankan tugas menggantikan kepengurusan yang lama dengan yang baru dalam Periode 2015-2020.

Tabel 3.6 Kepengurusan DPP PAN Kota Palembang

KETUA PDW PAN SUMSEL	H. ISKANDAR, SE
SEKERTARIS DPW PAN SUMSEL	KH.M. UMAR HALIM
KETUA DPD PAN KOTA PALEMBANG	I. EDDY AGUSDIAN
SEKERTARIS DPD PAN KOTA PALEMBANG	RUSPANDA KARIBULLAH, ST
BENDAHARA DPD PAN KOTA PALEMBANG	Hj. CIK NONA

Sumber : Wawancara Penulis dengan Narasumber



Kantor DPD PAN kota Palembang

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pemilihan Presiden 2019 terdapat dua pasang yang mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut, salah satunya pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang didukung oleh koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, dan terakhir bergabung Partai Demokrat. Namun, setelah hasil pemilihan presiden keluar dan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam pembentukan kabinet Jokowi jilid II atau Kabinet Kementerian Indonesia Maju. Hal mengejutkan datang dari lawan politik Jokowi- Ma'ruf, yaitu hadirnya Prabowo dalam susunan kabinet tersebut yang notabene sebagai Capres dan lawan bertarung Jokowi sendiri.

Disamping itu juga, Prabowo Capres dan juga ketua umum partai GERINDRA sebagai partai politik yang memprakasai dalam membentuk koalisi bersama partai-partai politik lainnya. Namun pada akhirnya memilih dan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dalam hal tersebut koalisi yang ditingkalkan Prabowo Subianto bubar, tetapi masih ada hal yang menarik untuk diteliti yakni sikap politik partai pendukung Prabowo-Sandi terhadap bergabungnya Partai Gerindra ke Pemerintahan yaitu sikap politik dari Partai PAN dan PKS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sikap politik partai PAN dan PKS terhadap bergabungnya partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju dan Faktor- faktor yang mempengaruhi bergabungnya partai GERINDRA ke koalisi Indonesia Maju.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori budaya politik dari Almond dan Verba.

Almond dan Verba mengemukakan bahwa sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk beraksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Berdasarkan sikap politik dapat diperkirakan perilaku politik apa yang akan muncul. Sikap pada umumnya bersifat relatif menetap atau tidak mudah berubah yang erat hubungannya dengan political efficacy yaitu suatu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian tentang persepsi dan kepercayaan yang dimiliki seseorang atau kelompok tentang kemampuannya dalam memahami politik, untuk didengar dan untuk membuat perubahan atau keputusan politik.

Almond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan individu tentang objek politik terdapat tiga komponen utama didalam sikap politik. Sikap individu terhadap objek politik dapat dilihat dari tiga komponen berikut:

- a. Komponen Kognitif, yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya.
- b. Komponen Afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilanya.
- c. Komponen Evaluatif, yaitu keputusan dan praduga tentang objek- objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Point-point tersebut akan diuraikan, sehingga akan menggambarkan jawaban rumusan masalah yang pertama tentang sikap politik PAN dan PKS terhadap bergabungnya Gerindra ke koalisi Indonesia Maju.

A. Sikap Politik Partai PKS dan PAN Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia

1. Komponen *kognitif* yang menyangkut pengetahuan tentang politik serta kepercayaan pada politik. Komponen kognitif berisi persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Komponen kognitif berisi pengetahuan, pendapat seseorang akan suatu objek atau fenomena dan kepercayaan orang terhadap sesuatu.

“kami percaya langkah yang diambil oleh partai Gerindra pasca PILPRES pada pemilu tahun 2019 yang lalu yaitu, bergabung bersama pemerintahan (koalisi Indonesia maju). Kami dari partai PKS menghormati keputusan yang telah diambil oleh partai Gerindra. Karenamenurut kami politik itu bersifat dinamis tidak ada teman yang abadi danlawan yang abadi” (Jumono Sekjen partai PKS Kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Sekjen partai PKS kota Palembang Bapak Jumono, ST. Dapat disimpulkan bahwa partai PKS kota Palembang percaya keputusan yang diambil oleh partai Gerindra yang bergabung bersama pemerintahan, merupakan keputusan internal partai Gerindra itu sendiri dengan perhitungan dan kalkulasi internal partai Gerindra itu sendiri.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Iswahyudi kader partai PKS kota palembang. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“kami menghormati langkah yang dilakukan oleh teman kita (partai Gerindra), dan kami juga percaya bahwa Gerinda memiliki penilaian sendiri yang sistematis jika sudah bergabung

ke koalisi pemerintahan”(Iswahyudi Kader partai PKS kota Palembang,2020)

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Iswahyudi kader dari partai PKS, dapat disimpulkan bahwa partai PKS memang menghormati keputusan Partai Gerindra dengan langkah dan penilaian yang sudah dilakukan secara sistematis sebelum mengambil keputusan untuk bergabung ke pemerintahan.



Gambar 4.1 RAKORWIL PKS SUMSEL

Sumber: DPP PKS kota Palembang

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari partai PAN mengemukakan hasil yang tidak jauh berbeda dengan partai PKS.

“dalam terbentuknya koalisi Indonesia Adil Makmur bukan merupakan koalisi yang permanen akan tetapi koalisi yang dibentuk untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga. Dengan berjalannya dinamika politik yang tinggi sehingga menghasilkan pergeseran yaitu merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintahan. Buat Partai PAN sendiri itu adalah urusan rumah tangga mereka (Partai Gerindra) kami pun menghormati dan mempercayai keputusan yang telah diambil oleh Partai Gerindra

merupakan keputusan terbaik dengan kalkulasi yang tepat” (Supriyadi kepala pengurus kantor DPP partai PAN kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Supriyadi kepala pengurus kantor DPP dari Partai PAN kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa Partai PAN menghormati dan mempercayai pada keputusan Partai Gerindra yang bergabung dalam koalisi pemerintahan, dan juga Partai PAN memang sudah melihat dari awal terbentuknya koalisi Indonesia Adil Makmur ini bukan koalisi yang terbentuk secara permanen melainkan koalisi yang terbentuk untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga dalam PILPRES 2019 yang lalu.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Gamal Hoesni kader dari Partai PAN kota Palembang. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“dalam pengambilan keputusan yang telah disepakati oleh Partai Gerindra. Kami menilai bahwa Gerindra memang sudah mempunyai keputusan yang sudah mereka (Partai Gerindra) perhitungkan. Apakah ini memang keputusan untuk mengembalikan situasi politik pasca PILPRES 2019 lali atau untuk PILPRES yang akan datang, kita tetap menghormatinya” (Gamal Hoesni kader DPP partai PAN kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan dengan Bapak Gamal Hoesni kader dari Partai PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Partai PAN menghormati keputusan yang telah diambil oleh partai Gerindra. Partai PAN menilai keputusan yang sudah diambil dapat diartikan sebagai keputusan

untuk mengembalikan situasi politik yang kondusif pasca PILPRES 2019 lalu, atau memang suatu strategi yang mulai disusun untuk sebuah pertarungan PILPRES yang akan datang.

Dalam kesimpulan Peneliti dengan Narasumber diatas dalam penggunaan Komponen Kognitif, yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibanya.

PKS dan PAN pada kesimpulan dari hasil wawancara dalam persepsi partai PKS dan partai PAN mereka menerima hasil keputusan yang dikeluarkan oleh partai Gerindra untuk bergabung ke koalisi Indonesia Maju, karena politik sendiri bersifat dinamis. Sedangkan dalam kepercayaan PKS dan PAN mereka percaya langkah yang diambil oleh partai Gerindra untuk bergabung ke koalisi Indonesia Maju merupakan keputusan terbaik dengan kalkulasi politik yang baik dan cermat serta sudah dipertimbangkan secara tepat. Untuk Stereotip PKS dan PAN pada kesimpulan diatas dalam stereotip (penilaian) partai PKS dan partai PAN mereka menilai bahwa partai Gerindra memiliki strategi pada pemilu 2024 atau memang untuk mengembalikan keadaan politik pasca pemilu 2019.

2. Komponen Afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilanya. Secara umum bahwa komponen afektif merupakan perasaan yang timbul dari seseorang terhadap suatu objek.

“Sikap politik itu demokratis, tidak bisa dikekang setiap orang bebas dengan pilihannya, artiannya dalam bab pilihan politik DPP Gerindra masuk ke koalisi dan ikut dalam

pemerintahan, kita legowo dan tidak mempermasalahkan itu karena itu memang pilihan politik, kami menyakini ada kalkulasi-kalkulasi politik yaitu mereka punya pertimbangan sendiri dan kami pun yang tetap diluar pemerintahan pun mohon untuk dipahami” (Jumono Sekjen DPP partai PKS kota Palembang,2020)

Dalam wawancara penulis diatas dengan Sekjen partai PKS kota Palembang Bapak Jumono, ST. dapat disimpulkan bahwa sikap politik itu demokratis, tidak ada bisa yang mengekang dan bebas dengan pilihannya sendiri. Sikap seseorang ataupun suatu lembaga politik itu bebas dalam pilihannya dan tidak ada yang bisa mengekang selama keputusan atau sikap tersebut tidak berbenturan dengan norma-norma dan melanggar undang-undang. Serta negara Indonesia juga bersistamkan demokrasi yang membebaskan setiap orang ataupun lembaga untuk bersuara, berpendapat, dan bertindak

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Iswahyudi kader partai PKS kota palembang. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“Kami juga berpendapat bahwa keberadaan kami sebagai oposisi atau keberadaan kami diluar pemerintahan tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintahan, hal tersebut dilakukan melalui kepengurusan pusat, karena setiap pemerintahan harus mempunyai pengontrol dari setiap kebijakan pemerintahan yang kurang baik agar tetap berada dijalur yang semestinya” (Iswahyudi kader DPP partai PKS kota Palembang,2020)

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Iswahyudi kader dari Partai PKS kota Palembang menyatakan bahwa keberadaan mereka diluar pemerintahan tetap dibutuhkan sebagai oposisi. Secara langsung PKS mempunyai sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi, walaupun Partai Gerindra tidak lagi bersama mereka. Sebagai oposisi pemerintahan, PKS akan tetap menjadi sebagai pengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan yang tidak pro-rakyat. Didalam suatu sistem pemerintahan yang berjalan memang tetap dibutuhkan agar pemerintahan yang sedang berjalan ada pihak penyeimbang sebagai pengawas pemerintahan yang berdampak pada bentuk pemerintahan yang baik tanpa penyimpangan.

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari partai PAN mengemukakan hasil yang tidak jauh berbeda dengan partai PKS

“perkembangan yang berjalan dalam tubuh Partai PAN menyikapi hasil keputusan sikap politik teman kita (Partai Gerindra) yang tetap kami hargai dan juga tidak menjadikan hubungan antara PAN dan Gerindra pecah dalam menyikapi langkah politik yang mereka (Partai Gerindra) ambil. Dan kami tetap bersikap untuk diluar pemerintahan” (Supriyadi kepala pengurus kantor DPP partai PAN kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Supriyadi kepala pengurus kantor DPP dari Partai PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa partai PAN menghormati atas langkah politik yang Partai Gerindra ambil tidak membuat hubungan Partai PAN dan Partai Gerindra

manjadi bermusuhan. Serta sikap tegas yang diambil oleh Partai PAN tetap berada di luar kabinet pemerintahan.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Gemal Hoesni kader partai PAN kota Palembang. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“Pasca PILPRES 2019 yang lalu seperti kita ketahui teman kita (Partai Gerindra) memilih untuk bergabung ke koalisi pemerintahan dan meninggalkan koalisi Indonesia Makmur. Kami menerima hasil keputusan tersebut dengan legowo dan sedikit menyesalkan hasil dari sikap politik tersebut akan tetapi kami memahami sikap politik tersebut dan mengembalikan pada urusan rumah tangga mereka (Partai Gerindra) atas keputusan tersebut”(Gamal Hoesni kader DPP partai PAN kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Gamal Hoesni kader dari Partai PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa partai PAN menerima dengan legowo atas keputusan partai Gerindra untuk bergabung ke koalisi pemerintahan dan meninggalkan koalisi adil makmur, akan tetapi Partai PAN sedikit kecewa atas keputusan tersebut serta mengembalikan keputusan yang telah di ambil oleh Partai Gerindra ke urusan rumah tangga masing-masing Partai.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yurizal,SH. Ketua DPC Kecamatan Alang-Alang Lebar Partai PAN kota Palembang. Hasil wawancara antara peneliti dan narasumber sebagai berikut:

“Hasil PILPRES 2019 lalu, kami dari Partai PAN melihat bahwa langkah politik teman kita (Partai Gerindra)

untuk bergabung ke pemerintahan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Ketika suatu koalisi terbentuk tidak mendapatkan hasil maksimal, maka Partai Politik berhak mengambil sikap politik untuk menjadi oposisi atau menjadi bagian dari pemerintahan”(Yurizal ketua DPC kecamatan alang-alang lebar DPP partai PAN kota Palembang,2020).

Hasil wawancara penulis diatas dengan Bapak Yurizal, SH. Ketua DPC Kecamatan Alang-Alang Lebar PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Partai PAN menyikapi keputusan sikap politik Partai Gerindra hal yang wajar dalam sebuah koalisi ketika suatu koalisi terbentuk tetapi tidak mencapai hasil yang maksimal maka Partai Politik bisa bersikap untuk tetap ber-oposisi atau menjadi bagian dari pemerintahan, karena itu merupakan keputusan rumah tangga setiap Partai Politik.

Dalam kesimpulan penulis dari wawancara bersama kader partai PKS dan PAN dapat disimpulkan bahwa. Menurut Partai PKS sikap politik itu sendiri dinamis artinya tidak bisa dikekang pada pilihannya keberadaan kami sebagai oposisi setelah ditinggal oleh koalisi bersama partai Gerindra tidak dipermasalahakan karena kita juga legowo menerima partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju akan tetapi kami juga bebas memilih koalisi pasca ditinggal dan keputusan kami adalah berkoalisi bersama rakyat.

Sedangkan untuk Partai PAN perkembangan yang berjalan dari partai PAN menyikapi hasil keputusan partai Gerindra yang bergabung ke koalisi Indonesia Maju dan meninggalkan koalisi Indonesia Adil Makmur, kami

menerimanya akan tetapi sedikit menyesalkan untuk meninggalkan koalisi ini, serta hasil keputusan tersebut tidak berarti membuat hubungan partai PAN dan partai Gerindra pecah kita tetap berhubungan baik dan kita tetap menghormatinya.

3. Komponen Evaluatif, yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

“Koalisi dan oposisi itu berlaku dilevel pusat, tidak serta merta apa yang ada dipusat dibawa ke kota atau kabupaten bisa kita artikan lebih cair atau beda penyikapan, kalau di kota palembang kita dinamis dan tidak mempertentangkan hal tersebut begitu konteksnya”(Jumono Sekjen DPP partai PKS kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Jumono, ST. Sekjen dari Partai PKS kota Palembang dapat disimpulkan bahwa sistem koalisi tersebut lebih cenderung berada dikepengurusan pusat, sedangkan untuk tingkat kepengurusan di Kota atau Kabupaten lebih cair dan beda penyikapan politik, seperti halnya pada kepengurusan PKS Kota Palembang bersikap dinamis dengan keputusan yang diambil dari kepengurusan pusat serta PKS Kota Palembang tidak begitu mempertentangkan masalah bergabungnya Partai Gerindra ke pemerintahan.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Iswahyudi kader partai PKS kota palembang. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“Dengan bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan yang pastinya dapat dikatakan kita kehilangan kawan biarlah itu masyarakat yang menilai, akan tetapi setidaknya Partai PKS tetap diluar koalisi pemerintahan. Yang tentunya sekarang teman kita adalah umat (masyarakat) disamping kita juga tetap menajalin komunikasi politik dengan partai PAN dan Demokrat, itu yang menjadi keyakinan kami Partai PKS” (Iswahyudi kader DPP partai PKS kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Iswahyudi kader dari Partai PKS kota Palembang dapat disimpulkan Partai PKS meyakini dan percaya untuk tetap berada diluar pemerintahan sebagai Partai oposisi dalam membela kepentingan masyarakat dan menjadi control penyeimbang dari pemerintahan dan tetap menjaga hubungan baik dengan Partai PAN dan Partai Demokrat, walaupun PKS kehilangan teman politik yaitu Partai Gerindra dengan bergabungnya ke koalisi pemerintahan Partai PKS dan membiarkan masyarakat yang menilainya. Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari partai PAN mengemukakan hasil yang tidak jauh berbeda dengan partai PKS.

“Setelah keputusan KPU pada PILPRES 2019 lalu, terjadilah pergeseran koalisi yang awalnya PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat terpecah dengan bergabungnya Gerindra ke koalisi kabinet Jokowi- Mar’ruf Amin. Walaupun beberapa tokoh dari PAN ingin bergabung ke pemerintahan tetapi kami (Partai PAN) tetap keputusannya kami tetap diluar dari pemerintahan sampai pada kongres Kendari kemarin kami tetap diluar pemerintahan”(Supriyadi kepala pengurus kantor DPP partai PAN kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Supriyadi kepala pengurus kantor DPP dari Partai PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa partai PAN setelah keluarnya hasil perhitungan KPU pada PILPRES 2019 yang lalu, dengan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan maka pada keputusan hasil dari kongres kendari Partai PAN. Partai PAN tetap berada diluar dari koalisi pemerintahan dan tidak bergabung ke koalisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin walaupun beberapa tokoh dari Partai PAN ingin ikut bergabung akan tetapi keputusan Partai PAN tetap tidak ikut bergabung ke koalisi pemerintahan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yurizal,SH. Ketua DPC Kecamatan Alang-Alang Lebar Partai PAN kota Palembang. Hasil wawancara antara peneliti dan narasumber sebagai berikut:

“Kalau untuk masalah pusat dalam hal ini bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan kita (Partai PAN kota Palembang) tidak bisa bersikap langsung, walaupun kita punya pendapat untuk ikut bergabung juga, misalnya PAN kota Palembang menginginkan hal yang sama dengan Partai Gerindra maka kita bisa menyuarakannya di RAKERNAS atau Kongres pusat Partai PAN” (Yurizal ketua DPC kecamatan alang- alang lebar DPP partai PAN kota Palembang,2020).

Hasil wawancara penulis diatas dengan Bapak Yurizal, SH. Ketua DPC Kecamatan Alang-Alang Lebar PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Partai PAN kota Palembang tidak bisa bersikap langsung. Akan tetapi Partai PAN kota Palembang dapat menyampaikannya pada RAKERNAS atau Kongres pusat. Jika

partai PAN kota Palembang ingin bersikap politik seperti keputusan Partai Gerindra. Hasil dari keputusan pusat pada RAKERNAS atau Kongres itu yang akan menentukan sikap politik Partai PAN bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan.

Kesimpulan penulis dan narasumber dari Partai PAN dan PKS untuk Partai PKS pada kesimpulan dalam wawancara dengan kader partai PKS dapat disimpulkan koalisi dan oposisi itu berlaku di level pusat, sedangkan di daerah kota atau kabupaten tidak berlaku. Dengan bergabungnya partai Gerindra kekoalisi Indonesia Maju pastinya dapat dikatakan kita kehilangan teman politik akan tetapi kami dari partai PKS tetap berada diluar pemerintahan untuk menjadi oposisi dan membiarkan masyarakat menilai mengenai hasil keputusan partai Gerindra.

Sedangkan untuk Partai PAN setelah keputusan KPU pada PILPRES 2019 lalu. Terjadilah pergeseran koalisi dengan bergabungnya partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju. Untuk partai PAN sendiri khususnya DPP partai PAN kota Palembang kami tidak bisa bersikap langsung untuk menentukan bergabung atau tetap diluar pemerintahan, kami harus melalui beberapa tahapan yaitu dengan RAKERNAS. Hasil dari keputusannya partai PAN tetap berada diluar pemerintahan dan tidak mempermasalahkan secara berlebihan hasil dari keputusan partai Gerindra karena partai PAN sendiri tetap berpegang pada VISI dan MISI partai PAN sendiri.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Maju

Pada hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah diputuskan hasil dari KPU yang memenangkan pasangan nomor urut 1 Jokowi dan Ma'ruf Amin, Namun, setelah hasil pemilihan presiden keluar dan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam pembentukan kabinet Jokowi jilid II atau Kabinet Kementerian Indonesia Maju. Hal mengejutkan datang dari lawan politik Jokowi-Ma'ruf, yaitu hadirnya Prabowo dalam susunan kabinet tersebut yang notabene sebagai Capres dan lawan bertarung Jokowi sendiri.

Pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang didukung oleh koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat dinyatakan bubar setelah merapatnya Partai Gerindra yang akhirnya masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju menurut Partai PKS dan Partai PAN kota Palembang.

Pada PILPRES 2014 lalu di Indonesia terdapat dua pasang calon Presiden yaitu Prabowo-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk pasangan Prabowo-Hatta Rajasa diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, Partai PKS, Partai PPP, dan Partai Bulan Bintang, disinilah awal munculnya koalisi Partai Gerindra dan Partai PKS yang digadang sebagai koalisi solid, akan tetapi pada hasil keputusan PILPRES 2014 lalu pasangan Prabowo-Hatta Rajasa kalah telak oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terdapat perubahan koalisi politik dengan bergabungnya Partai Golkar, Partai PPP, dan Partai PAN ke koalisi pemerintahan sedangkan untuk

koalisi merah putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai PKS, dan Partai Bulan Bintang.

Dengan tetap bersamanya Partai Gerindra dan Partai PKS inilah yang digadang-gadang sebagai hubungan partai yang konsisten antara Partai Gerindra dan Partai PKS karena tetap berada diluar pemerintahan sebagai koalisi oposisi hingga pada PILPRES 2019.

Pada PILPRES 2019 yang juga diikuti oleh 2 PASLON Presiden antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Untuk pasangan Prabowo- Sandiaga diusung oleh PARPOL Partai Gerindra, Partai PKS, Partai PAN, Partai Berkarya, dan Partai Demokrat. Namun pada hasil keputusuan KPU pada PILPRES 2019 pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan menang, dan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno kalah, setelah hasil keputusan PILPRES inilah terjadi pergeseran koalisi Politik yaitu bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan dengan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan maka koalisi Indonesia Adil Makmur dinyatakan bubar hal tersebut disampaikan oleh SEKJEN Partai Gerindra (detik.com,2021).

Hal inilah yang membuat penulis mewawancarai Partai PKS khususnya DPP Partai PKS kota Palembang dengan Faktor-Faktor yang mempengaruhi bergabungnya Partai Gerindra Ke Ke Koalisi Indonesia Maju menurut DPP Partai PKS kota Palembang.

Berikut hasil wawancara penulis dengan sekjen partai PKS kota Palembang Bapak Jumono, ST.

“Menurut kami (Partai PKS) faktor yang mempengaruhi Partai Gerindra bergabung dengan untuk menghadapi PILPRES 2024 , dan juga PILPRES 2019 yang lalu terjadi perpecahan 2 kubu para pendukung, untuk keselamatan dan persatuan Indonesia dengan

harapan para pendukung dapat bersatu kembali “ (Jumono Sekjen DPP partai PKS kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Jumono, ST. Sekjen dari Partai PKS kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Partai PKS menilai faktor yang mempengaruhi Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan untuk menjaga keselamatan dan persatuan Indonesia dengan menyatukan kembali 2 kubu yang pecah pada PILPRES 2019 yang lalu dan juga untuk persiapan PILPRES 2024 yang akan datang.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Iswahyudi kader partai PKS kota Palembang. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“Menurut kami (Partai PKS) dalam melihat pada bab politik ini, kami menilai Partai Gerindra memiliki strategi yang bisa kita lihat untuk PILPRES 2024 yang akan datang, untuk tetap menjaga elektabilitas Partai dimasyarakat“ (Iswahyudi kader DPP partai PKS kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis diatas dengan Bapak Iswahyudi Kader Partai PKS kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Partai PKS melihat pada bab pilihan politik Partai Gerindra mempunyai strategi untuk PILPRES 2024 yang akan datang, dengan memilih untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan dan tetap menjaga elektabilitas partai di masyarakat.

PILPRES 2014 lalu diikuti oleh dua pasangan calon Presiden yaitu Prabowo-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa sendiri diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, Partai PKS, Partai PPP, dan Partai Bulan Bintang. Pada hasil keputusan KPU PILPRES

2014 pasangan Prabowo-Hatta Rajasa kalah telak dari Pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin. Setelah kekalahan tersebut terjadilah beberapa pergeseran koalisi di kubu pengusung Prabowo-Hatta Rajasa dengan bergabungnya beberapa partai politik yang awalnya bersama dalam satu kubu koalisi yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai PAN memilih untuk bergabung bersama koalisi pemerintahan.

Pada PILPRES 2019 kemarin, kembali lagi Prabowo Subianto mencalonkan diri lagi sebagai Presiden kini Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada PILPRES 2019 lalu pasangan Prabowo-Sandiaga diusung oleh Partai Gerindra, Partai PKS, Partai PAN, Partai Berkarya, dan Partai Demokrat dengan kembalinya Partai PAN untuk ber-koalisi bersama kembali seperti pada tahun 2014. setelah berlangsungnya PILPRES 2019 dengan hasil keputusan KPU yang menyatakan kembali kemenangan terhadap Joko Widodo-Ma'ruf Amin, hasil dari keputusan inilah yang pada akhirnya membuat koalisi partai pendukung Prabwo- Sandiaga pecah, dengan bergabungnya ketua umum dari partai Gerindra tersebut Prabowo Subianto ke dalam tubuh pemerintahan yang secara otomatis juga partai Gerindra masuk ber-koalisi ke pemerintahan maka koalisi Indonesia Adil Makmur dinyatakan bubar.

Hal inilah yang membuat penulis mewawancarai Partai PAN khususnya DPP Partai PAN kota Palembang dengan Faktor-Faktor yang mempengaruhi bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Maju menurut DPP Partai PAN kota Palembang.Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari partai PAN mengemukakan hasil yang tidak jauh berbeda dengan partai PKS.

“Menurut kami sikap dan langkah politik bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan kami melihat bahwa Partai Gerindra memang menyiapkan suatu strategi yang sudah dikalkulasi dengan matang. Bisa kita lihat sebagai suatu langkah politik dalam PILPRES 2024 yang akan datang atau ada motif lain yang bisa kita tunggu pada saatnya nanti” (Gamal Hoesni kader DPP partai PAN kota Palembang,2020).

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Gamal Hoesni kader Partai PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Partai PAN kota Palembang melihat Partai Gerindra memang sudah menyiapkan suatu strategi dengan kalkulasi yang matang untuk PILPRES 2024 yang akan datang dengan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Yurizal, SH. ketua DPC Kecamatan Alang-Alang Lebar partai PAN kota Palembang. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“Menurut kami melihat pada hasil keputusan Partai Gerindra dengan bergabungnya ke koalisi pemerintahan ialah sebagai keputusan mutlak dari Partai tersebut, dalam kata lain urusan rumah tangga Partai dan kami (Partai PAN) juga menilai tidak etis untuk menduga dan mengira-ngira langkah Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan”(Yurizal ketua DPC kecamatan alang-alang lebar DPP partai PAN kotaPalembang,2020).

Hasil wawancara penulis diatas dengan Bapak Yurizal, SH. Ketua DPC Kecamatan Alang-Alang Lebar PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Partai PAN kota Palembang tidak ingin menduga langkah apa yang dilakukan Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan dan menyerahkan sikap Partai Gerindra ke urusan rumah tangga masing-masing Partai politik.

Hal serupa juga disampaikan Bapak Supriyadi kepala pengurus kantor DPP dari Partai PAN kota Palembang. Hasil wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

“Menurut kami (Partai PAN) setelah PILPRES 2019, kami melihat faktor yang mempengaruhi merapatnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan untuk tetap menjaga rekonsiliasi persatuan dan kesatuan anak bangsa, karena kita tahu pada tahun politik 2019 tersebut Indonesia terpecah menjadi 2 kubu” (Supriyadi kepala pengurus kantor DPP partai PAN kota Palembang,2020)

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Supriyadi kepala pengurus kantor DPP dari Partai PAN kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Partai PAN kota Palembang melihat bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia karena pada tahun politik 2019 lalu, Indonesia terpecah menjadi 2 kubu dengan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan untuk mencairkan situasi politik yang panas pada tahun 2019 yang lalu karena situasi politik.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan. Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam

administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.

Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita.

Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran-sasaran. Citra yang diinginkan terkait dengan pilihan tema, Gaya, Cara konfrontasi dan tawaran sumber daya manusia (Peter Scrooder,2009).

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer (Jasmariyadi,2011).

Pada kesimpulan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju Menurut Partai PKS dan Partai PAN”. Dapat disimpulkan bahwa partai PKS dan partai PAN memang melihat dengan bergabungnya partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju memang sebuah Strategi dan Elektabilitas untuk partai Gerindra sendiri dalam menghadapi PILPRES 2024 atau untuk menstabilkan situasi politik pasca PILPRES 2019.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian setelah menganalisa dan membahas data yang diperoleh dari penelitian maka dapat diambil kesimpulan. Bahwa menurut Partai PKS dan Partai PAN kota Palembang terhadap bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju sebagai berikut:

1. Dalam komponen kepercayaan pada politik persepsi Partai PKS dan Partai PAN terhadap bergabungnya ke koalisi pemerintah menghormati segala keputusan yang diambil Partai Gerindra untuk bergabung ke pemerintahan. Komponen tentang perasaan terhadap peran dan aktor politik dalam langkah politik Partai PKS dan Partai PAN menerima dan beresikap legowo dan tidak mempermasalahkan walaupun disamping itu Partai PKS dan Partai PAN sedikit kecewa terhadap bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan. Sedangkan untuk komponen evaluatif keputusan dan praduga terhadap objek adalah Partai PKS dan Partai PAN melihat dengan bergabungnya Partai Gerindra ke pemerintahan, menerima hasil keputusan tersebut dan mengembailkan pada urusan rumah tangga partai politik masing- masing.
2. Partai PKS dan partai PAN memang melihat dengan keputusan bergabungnya partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju memang sebuah Strategi dan Elektabilitas untuk partai Gerindra sendiri dalam menghadapi PILPRES 2024 atau untuk

menstabilkan situasi politik pasca PILPRES 2019, agar tidak lagi ada perpecahan antara kedua pendukung.

B. SARAN

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Partai PKS dan Partai PAN tetap konsisten pada tujuan yang berdasarkan pada prinsip partai yang telah dibentuk dan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat yang utama
- b. Partai Gerindra harus bekerja secara maksimal memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam satu koalisi pemerintahan serta ikut dalam perdamaian dunia dan menjaga NKRI dari tangan-tangan asing.
- c. Untuk peneliti berikutnya, yang akan meneliti tentang sikap politik partai pendukung Parbowo-Sandi terhadap bergabungnya partai Gerindra ke koalisi pemerintahan, lebih mendalam lagi dalam perspektif pendapat anggota partai di daerah ataupun nasional.

SKRIPSI

BUKU

- Azwar, Syaifuddin. (2013). *Sikap manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamikan Pemilu Dan Pilkada di Era Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marijan, Kacung. (2019). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sarwono, S. W. (1997). *Psikologi social: Individu dan Teori-Teori Psikologi social*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Verba, Sidney., & Almond A Gabriel, (1984). *Budaya Politik: Tingkah laku politik dan demokrasi di lima Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Jurnal

- Kamil, A. B. (2017). Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 1(2).
- Lijphart, A. (1991). Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observation. *Democracy and Political Transformation. Theories and East- Central European Realities, Budapest: Hungarian Political Science Association*, 75-93.
- Prasasti, E. S. (2017) *Partai Politik dan Koalisi (Perbedaan Sikap Partai Keadilan Sejahtera [PKS] dengan Sesama Pendukung Pemerintah SBY Periode 2009-2014)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

Subhan. (2017). *Koalisi Partai Politik (studi tentang factor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik dari pemerintahan Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno Putri)* (Bachelor's thesis, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga).

Sumadinata, R. W. S. (2016). Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 1-4.

Syahputra, G. N. (2007) *Sikap Politik Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla* (Bachelor's thesis, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel).

Yusmana, M. A. (2020) *Partai politik dan pemilu: Sikap politik partai kebangkitan bangsa dalam menanggapi presidential threshold 2019* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

Zakiah, Q. M. (2017). *Partai Politik Dan Koalisi Pemerintahan (Studi atas Dampak Konflik Elite Partai GOLKAR Tahun 2014-2016 terhadap Dukungan Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

Dari Internet

Astuti, Rizki, (2019). *Koalisi Partai Dalam Pilpres 2019* diakses dari www.detiknews.com tanggal 16 Maret 2020

Dimas, (2019). *Prabowo Subianto Kembali Bertarung Dalam Pilpres 2019*

diakses dari www.detiknews.com tanggal 18 Maret 2020

Dikominfo, (2018) *Sejarah Palembang* diakses dari www.palembang.go.id tanggal 20 Juli 2019

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

SIKAP PARTAI POLITIK PENDUKUNG PRABOWO-SANDI DENGAN BERGABUNGNYA GERINDRA KE KOALISI INDOENSIA MAJU

Kader partai PAN dan partai PKS

1. Bagaimana tanggapan dari PKS kota Palembang mengenai bergabungnya Prabowo ke pemerintahan?
2. Bagaimana persepsi PKS kota Palembang terhadap bubarnya koalisi Merah Putih?
3. Secara pribadi bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap bubarnya koalisi Merah Putih dan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan?
4. Secara pribadi apakah tindakan dan kebijakan yang harus dilakukan partai dalam masalah ini?
5. Apakah dampak dari bubarnya koalisi Merah Putih terhadap partai PKS kota Palembang?
6. Apa kebijakan dan sikap yang diambil PKS kota Palembang terhadap bubarnya koalisi Merah Putih sama dengan yang dilakukan PKS pusat?
7. Jika ada sikap yang diambil sendiri oleh PKS kota Palembang, seperti apakah itu?
8. Menurut bapak/ibu faktor apa yang mempengaruhi Partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Jumono SEKJEN Partai PKS kota Palembang



Wawancara bersama bapak Hasbi Kader Partai PKS kota Palembang



Wawancara bersama kader Partai PAN kota Palembang



Wawancara bersama bapak Yurizal ketua DPC Partai PAN kota Palembang



Wawancara bersama bapak Supriyadi kepala pengurus kantor DPP PAN kota Palembang



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.911/Uh.09/VIII/PP.01/08/2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Muhammad Fajri*, tanggal, 17 April 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/IE/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Andi Chandra Jaya, M.Hum	19720119 200701 1 011	Pembimbing I
Reni Apriani, M.Si.	2021049401	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : **Muhammad Fajri**
N I M : **1657029075**
Prodi : **Ilmu Politik**

Judul Skripsi :

"Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi terhadap Bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Maju"

Masa bimbingan : **Satu Tahun TMT. 25 Agustus 2020 sid 25 Agustus 2021**

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Arsip;





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : 052/Un.09/VIII/TP.01/09/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth

1. Pimpinan DPD PAN Kota Palembang
2. Pimpinan DPD PKS Kota Palembang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Fajri
NIM : 1657020075
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : **"Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi terhadap Bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Maju"**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Palembang, 2 September 2020

Tembusan
1. Ka Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip





SURAT KETERANGAN
NOMOR : 13/KTR/AF-09- PKS/1442

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama : MUHAMMAD RIDWAN, S.H., MH
b. Jabatan : Ketua Umum DPD PKS Palembang

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Fajri
NIM : 1657020075
Pekerjaan : Mahasiswa UIN RJ Palembang
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Prodi : Ilmu Politik

Memang benar yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian di DPD Partai PKS kota Palembang untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi " Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra Ke Koalisi Indonesia Maju"

Penelitian dilakukan berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: B.745/Un.09/VIII/TL.01/09/2020, tanggal 2 September 2020, perihal Mohon Izin Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 17 September 2020 M

29 Muharram 1442 H

DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA PALEMBANG



Mohammad Ridwan, S.H., MH

Ketua Umum

Tembusan

1. Yth. Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN RJ Ptg
2. Yth. Kap Prodi Ilmu Politik Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN RJ Ptg
3. Yang bersangkutan

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

J. Letnan Murad - Komplek Ruko Sehat Blok R2-3 No.948 RT.07 RW.02 - Kelurahan 20 Ilir D4 - Kecamatan Ilir Timur I Palembang - Sumatera Selatan - Telp. 0711-5715368 e-mail : palembang2009@gmail.com



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajri
NIM : 1657020075
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : **sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi terhadap bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju.**
Pembimbing I : Dr.Andi Chandra Jaya, M.Hum
Pembimbing II : Reni Apriani, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
	20-6-20'	- Perbaiki latar belakang.	/
	22-6-20'	- Acc Kas 1	/
	24-9-20'	- Acc Kas 2	/
	26-12-20'	- Acc Kas 3	/
	23-3-21'	- Acc Kas 4.	/
	23-3-21'	ACC Upa usya	/



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**






Nama Mahasiswa : Muhammad Fajri
 NIM : 1657020075
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : **sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi terhadap bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi Indonesia Maju.**
 Pembimbing I : Dr. Andi Chandra Jaya, M.Hum
 Pembimbing II : Reni Apriani, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
	24 Januari 201 Kamis	- Teori yang lebih spesifik untuk menjawab rumusan masalah	
	Juni 25 Januari 201 Sabtu	- Tinjauan Pustaka pada Bab II, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi	
	16 September 201 Rabu	- Pedoman wawancara	
	22 September 201 Selasa	- Acc Bab II	
	28 Desember 201 Senin	- Revisi Bab III (Susunan kata tabel)	
	24 Desember 201 Kamis	- Acc Bab III	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
	3 Maret 21' Rabu	- (Konsul analisis wawancara) pada Bab <u>IV</u>	
	3 Maret 21' Rabu	- Acc Bab <u>IV</u>	
	22 Maret 21' Senin	- Perbaiki susunan letak Paragraf Bab <u>I, II, III, IV, V</u>	
	22 Maret 21' Senin	- Acc Bab <u>IV</u>	
	22 Maret 21' 7 April 21' Rabu	- Acc keseluruhan dan dibinjtukan ke Pembimbing I	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI




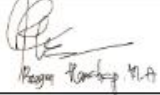
Pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Muhammad Fajri**
Nomor Induk Mahasiswa : **1657020075**
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Sikap politik partai pendukung prabowo-hbis sandi terhadap bergabungnya partai gerindra ke koalisi indonesia maju*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	Pembimbing I	
2	Reni Apriani, M.Si.	Pembimbing II	
3	Dr. Yenrizal, M.Si.	Penguji I	
4	Raegen Harahap, MA.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 4 Agustus 2021

Ketua

Dr. Eti Yuslita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

REKAPITULASI NILAI

Berita acara munaqasyah skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nama : **Muhammad Fajri**
Nomor Induk Mahasiswa : **1657020075**
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Hari / Tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021
Judul Skripsi : *Sikap politik partai pendukung prabowo-hbis sandi terhadap bergabungnya partai gerindra ke koalisi indonesia maju*

Komponen Penilaian :

No.	Tim Penguji	Jabatan	Nilai
1	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	Pembimbing I	80
2	Reni Apriani, M.Si.	Pembimbing II	84
3	Dr. Yenziral, M.Si.	Penguji I	65
4	Raegen Harahap, MA.	Penguji II	78
5	Nilai Rata-rata Ujian Komprehensif		78,8
Nilai Keseluruhan			385,8
Nilai Rata-rata			77,16
Nilai Akhir Dalam Huruf			B

IPK :
Total SKS :

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 19620620 198803 1 001

Palembang, 4 Agustus 2021

Wakil Dekan I

Dr. Yenziral, S.Sos., M.Si
NIP. 197401232005011004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : **Muhammad Fajri**
Nomor Induk Mahasiswa : **1657020075**
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Sikap politik partai pendukung prabowo-hbis sandi terhadap bergabungnya partai gerindra ke koalisi indonesia maju*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) _____

Palembang, 4 Agustus 2021
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita, S.Ag.,M.HI.
NIP. 197409242007012016